

**PELATIHAN KEAMANAN PANGAN BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH
KABUPATEN SUMEDANG GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK**

***FOOD SAFETY TRAINING FOR SMALL MEDIUM INDUSTRY
IN SUMEDANG REGENCY TO INCREASE PRODUCT COMPETITIVENESS***

Syamsul Huda, Robi Andoyo, Siti Nurhasanah*, Souvia Rahimah

Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: siti.nurhasanah@unpad.ac.id

(Diterima 05-01-2023; Disetujui 16-02-2023)

ABSTRAK

Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat membahayakan kesehatan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengawasan makanan tersebut. Industri Kecil Menengah (IKM) yang banyak berkembang di Kabupaten Sumedang salah satunya memproduksi makanan olahan dan minuman. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DISKOP-UKMPP) Kab. Sumedang memiliki target untuk bisa meningkatkan kualitas 1.000 UKM per tahunnya, termasuk di dalamnya IKM pangan. Produk IKM yang dihasilkan beraneka ragam, mulai dari jenis basah, semi basah, dan kering. Proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan analisis situasi, survey lokasi, *screening* 1 dan 2, pelatihan, dan evaluasi program melalui pendekatan partisipatif. Luaran dari kegiatan ini adalah 50 IKM di Kabupaten Sumedang teredukasi terkait keamanan pangan dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini lulus post-test dan terjadi peningkatan rata-rata nilai dari 7.4 menjadi 8.9.

Kata kunci: Industri Kecil menengah, keamanan pangan, fine tuning, Sumedang

ABSTRACT

Communities need to be protected from food that can endanger health, local governments are obliged to carry out supervision of these foods. Small and medium industries (IKM) which have developed a lot in Sumedang Regency one of them produces processed food and beverages. Office of Cooperatives, Small, Medium Enterprises, Trade and Industry (DISKOP-UKMPP) Kab. Sumedang has a target to improve the quality of 1,000 SMEs per year, including food SMEs. IKM products produced vary, ranging from wet, semi-wet, and dry types. The process of implementing the activities begins with a situation analysis, site survey, screening 1 and 2, training and program evaluation through a participatory approach. The output of this activity was that 50 IKM in Sumedang Regency were educated regarding food safety and all participants who took part in this activity passed the post-test and there was an increase in the average score from 7.4 to 8.9.

Keywords: Small and medium industry, food safety, fine tuning, Sumedang

PENDAHULUAN

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan yang diedarkan dalam

kemasan eceran dan berlabel. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, oleh karena itu pengawasan keamanan pangan merupakan hak bagi masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan, pemerintah daerah berkewajiban dan berwenang untuk menyelenggarakan pengawasan makanan tersebut. Kegiatan pengujian mutu pangan dari suatu produk sangat dibutuhkan agar menjamin mutu produk yang dijual dimasyarakat sesuai dengan standar yang berlaku.

Produk unggulan daerah, merupakan produk dengan keunikan/ciri khas yang dapat dihasilkan oleh IKM. Para pelaku usaha berupaya memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi budaya lokal. Untuk mengembangkan produknya agar mudah dikenal, mudah didapat, dan berdaya saing yang tinggi. Potensi produk unggulan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen di perguruan tinggi. Fasilitas yang ada di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi proses pada produk khususnya yang memiliki kekhasan wilayah. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan akan menghasilkan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi untuk berkompetisi pada pasar yang lebih luas lagi. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah, khususnya dalam hal koordinasi dan pemberian kebijakan yang berpihak pada koperasi dan UMKM penghasil produk unggulan daerah.

Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, Bandung. Seperti halnya kabupaten lain, kabupaten yang memiliki luas wilayah 153.124 ha dan jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa, juga menyimpan cukup banyak potensi sumber daya alam. Terutama potensi di sektor pariwisata, makanan khas, kerajinan tradisional, di samping peternakan, kehutanan, dan pertanian. Kondisi ini mendorong penduduk Sumedang untuk lebih kreatif terutama dalam hal pengembangan perekonomiannya. Salah satunya dengan pengembangan IKM di kabupaten Sumedang.

IKM yang banyak berkembang di Kabupaten, Sumedang salah satunya memproduksi makanan olahan dan minuman. DISKOP-UKMPP Kab. Sumedang memiliki target untuk bisa meningkatkan kualitas 1000 UKM per tahunnya termasuk di dalamnya IKM pangan. Produk IKM yang dihasilkan beraneka ragam, mulai dari jenis basah, semi basah, dan kering. Tujuan tersebut bisa dicapai salah satunya dengan memfasilitasi pelatihan keamanan pangan untuk menghasilkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Pelatihan ini merupakan

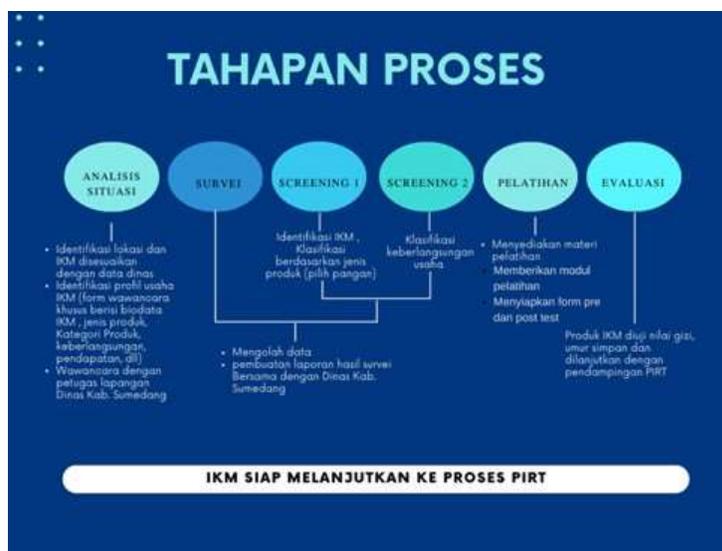
prasyarat untuk mendapatkan Sertifikasi Izin Edar Pangan, baik Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) maupun laik sehat. Syarat lainnya adalah pengujian produk, baik kandungan gizi/*Nutrition Fact* dan umur simpan, yang dilakukan oleh lembaga uji yang tersertifikasi. PIRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah terhadap pangan industri IRT di suatu wilayah. PIRT dibutuhkan oleh IKM untuk dapat menjual produknya secara legal dan memberikan jaminan bahwa makanan/minuman rumahan yang dijual dan beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan pangan sehingga produk dapat diedarkan dengan jalur distribusi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi (Komalasari, dkk, 2021).

Peranan IKM menjadi hal penting dari sisi pembukaan kesempatan kerja, penyebaran pendapatan, sumber pendapatan, serta pembangunan ekonomi. Kehadirannya menjadi salah satu motor penggerak dalam meningkatkan perkembangan perekonomian serta menjadi salah satu sumber penghasil devisa di Indonesia. Pertumbuhan ekspor dari IKM terus meningkat setiap tahunnya (Parasan, dkk, 2021).

Beragam program telah dijalankan DISKOP-UKMPP, baik dari segi bisnis maupun dalam hal mutu produk pangan yang dihasilkan, namun setiap tahun dibatasi jumlahnya. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: akurasi *database* IKM perlu ditingkatkan, dan sebagian kualitas produk IKM belum bisa bersaing. IKM berfungsi menjadi bantalan bagi perekonomian ketika terjadi banyak pengangguran. Dalam rangka untuk membantu para pelaku usaha mikro beradaptasi dengan kebiasaan baru (AKB), serta memutar kembali roda usahanya, diperlukan dukungan pemerintah sebagai pelengkap dan komplemen dari kebijakan stimulus yang sudah ada dalam kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Dengan berkembangnya IKM yang dibina Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang diharapkan dapat memberikan efek berupa meningkatnya taraf hidup masyarakat.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (Sangian, dkk, 2018). Metode ini bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Uraian serta tahapan kegiatan yang dilakukan pada pengabdian ini dapat digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Proses Pelatihan Keamanan Pangan

Proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan analisis situasi, survey lokasi, *screening* 1 dan 2, pelatihan, dan evaluasi program. Penetapan lokasi ini dilatarbelakangi oleh lokasi mitra berada di wilayah perguruan tinggi pelaksana dalam hal ini Universitas Padjadjaran dan IKM di Kabupaten Sumedang potensinya sangat besar akan tetapi masih terdapatnya beberapa keterbatasan, salah satunya pemahaman tentang keamanan pangan dan IKM yang belum memiliki sertifikat PIRT masih sangat banyak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal dari pelaksanaan kegiatan ini adalah analisis situasi dengan metode *Fine tuning data base* yang untuk mempermudah pendataan, pembentukan *database* IKM, serta pengklasifikasian IKM yang ada di Kabupaten Sumedang. Dengan *database* yang akurat, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat memberdayakan data tersebut dengan baik. Kabupaten Sumedang memiliki IKM lebih dari 5.000 IKM yang banyak berkembang. UKM tersebut terdiri atas makanan olahan dan minuman, pakaian, dan lainnya. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu diupdate data IKM yang akurat, sehingga pendataan pelaku Industri kecil menengah sangat diperlukan dalam mendukung program pemerintah terhadap IKM. Kegiatan ini menghasilkan dokumentasi IKM yang sudah terkategori.

Materi yang disampaikan pada pelatihan ini adalah: Teknologi Proses Pengolahan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan, Pencantuman Label Halal, dan Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP, materi ini menjelaskan mengenai pengolahan makanan yang baik, bagaimana pentingnya pengemasan makanan terhadap komposisi bahan, serta

cara mengontrol mutu dan keamanan pangan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dapat menghasilkan produk olahan pangan yang baik, aman dikonsumsi, bermanfaat, serta memudahkan perolehan izin edar P-IRT dan sertifikasi halal. Materi selanjutnya dari BBPOM Provinsi Jawa Barat. Pada pemaparan materi ini menjelaskan pentingnya label BPOM, cara memperolehnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian layak tidaknya mendapat label BPOM. Selain itu, dijelaskan juga mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diizinkan dalam suatu produk pangan. BTP yang ditambahkan selama pengolahan juga wajib dicantumkan dalam komposisi agar konsumen mengetahui informasi detail serta dapat menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, terutama yang disebabkan oleh BTP. Materi terakhir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Materi yang disampaikan oleh Bapak Rahmat adalah seputar tata cara produksi pangan olahan yang benar, serta cara menerbitkan SPP-IRT melalui OSS, dan pengawasannya untuk dapat mengeluarkan SPP-IRT.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Produksi dan peredaran pangan oleh IRTP Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan

kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sub bidang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman mengamanatkan bahwa penerbitan izin produksi dan pengawasan produk makanan minuman industri rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dalam Rangka menjamin produk pangan IRTP yang akan beredar aman bermutu dan bergizi, diperlukan pelatihan Keamanan Pangan untuk Pelaku Industri Kecil Menengah agar IKM dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen. Saat ini diimplementasikan dengan sistem mutu pangan (Hermanu, 2016). Sasaran program keamanan pangan meliputi menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan, memantapkan kelembagaan pangan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan, serta meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Saat ini masih ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga masih dijumpai kasus keracunan makanan dan masih kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan. Pelaku usaha maupun konsumen mengetahui persyaratan peredaran produk agar tidak ditemui lagi barang-barang/jasa yang diperdagangkan yang merugikan konsumen (Hermanu, 2016). Keamanan pangan dapat dicapai dengan memilih bahan mentah dan bahan tambahan makanan, pengolahan pangan, pengemasan pangan, serta higienisasi pembuat makanan (Murhadi, dkk, 2022). Produk pangan dikatakan memenuhi persyaratan keamanan pangan jika tidak mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan pangan yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diizinkan (Rianti, dkk, 2018).

Luaran dari kegiatan ini adalah 50 IKM di Kabupaten Sumedang tereduksi terkait keamanan pangan. Peserta IKM yang datang diwajibkan untuk membawa produk olahannya masing-masing untuk selanjutnya diuji, kemudian dibantu pembuatan perizinan P-IRT, dan halal. Proses pembuatan izin edar P-IRT ini memerlukan sertifikat Pelatihan Keamanan

persaingan yang semakin ketat. Diperlukan informasi kondisi riil IKM sehingga akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh IKM, dan menjadikan produk unggulan (Firdausia, dkk, 2021).

Dengan adanya transfer pengetahuan dalam pelatihan bukan hanya sebagai prasyarat dalam proses PIRT, diharapkan IKM dapat mengembangkan potensi dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku IKM. IKM memerlukan kreasi dan kreatifitas guna menunjang daya saing di sektor pasar, industri maupun kearifan lokal hingga sehingga mampu bertahan pada bisnis global sekarang (Andriany, 2015). Pentingnya peranan IKM dapat dilihat pada era pasca krisis moneter, banyaknya pelaku industri skala besar yang mengalami gulung tikar salah satunya diakibatkan melonjaknya harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang kian melemah, bahkan sektor perbankan yang menjadi harapan permodalan juga ikut terpuruk akibat krisis ini, sehingga banyak pelaku industri memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan usaha mereka. Hal berbeda justru terjadi pada sektor IKM dimana sebagian besar pelaku usaha justru bertahan bahkan cenderung bertambah. Tentunya dengan kemampuannya bertahan sektor ini menjadi salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia (Pamikatsih, 2022).

Pre-test digunakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan yang akan diajarkan sudah dapat di kuasai oleh peserta pelatihan. Sedangkan *post-test* dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran pada pelatihan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta pelatihan terhadap materi, dan pokok penting materi yang dipelajari. Materi dari kedua tes ini berkaitan dengan materi yang diajarkan. Apabila peserta lebih memahami materi setelah proses pelatihan maka, program dinilai berhasil. Pengerjaan *pretest* dan *post test* berdasarkan pertanyaan yang sama (Magdalena, dkk, 2021; Pangestika, dkk, 2021). Nilai rata-rata *pretest* peserta pelatihan adalah 7.4, sedangkan nilai rata-rata *post test* adalah 8.9.

Pendampingan kepada pelaku IKM dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang diberikan oleh tim. Hal ini dilakukan agar mengetahui kesulitan yang dialami oleh mitra dalam penerapn materi yang telah diberikan, sehingga tim dapat memberikan jalan keluar terbaik untuk mitra. Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan meninjau kembali IKM dengan diskusi terkait aktivitas usaha setelah pelatihan. Atas masalah yang dialami oleh pelaku IKM diberikan beberapa solusi yang bisa diadaptasi secara langsung (Firdausia, dkk, 2021).

Dalam usaha menjamin keberhasilan program, tim pelaksana kegiatan ini terdiri atas 4 orang (ketua dan 3 anggota) dengan melibatkan pranata laboratorium dan mahasiswa yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan tujuan kegiatan. Dalam kegiatan ini 50 IKM di Kabupaten Sumedang tereduksi terkait keamanan pangan. Untuk menjamin keberlanjutan program perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan pasca pelaksanaan program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pelatihan Keamanan Pangan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu produk dari IKM Pangan daerah Kabupaten Sumedang. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh IKM yang terlibat merasa terbantu serta dapat menambah pemahaman dan wawasan para pelaku IKM khususnya mengenai keamanan pangan, pengemasan, label BPOM, izin edar P-IRT. Pada kegiatan ini, Pelaku IKM yang lulus pelatihan dibantu dalam uji pangan dan pembuatan izin edar P-IRT. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini lulus post-test dan terjadi peningkatan rata-rata nilai dari 7.4 menjadi 8.9.

Saran yang diajukan dari kegiatan ini adalah diperlukannya pendampingan yang intensif sampai IKM memperoleh sertifikat PIRT

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dukungan dana yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany, Dewi. 2015. "Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup." <http://fe.unp.ac.id/>.
- Firdausia, Y. K., Arianto, B., Puri, W., & Purnaningrum, E. (2021). Kelangsungan Usaha Melalui Legalitas Ijin Usaha Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Slempit Distrik Kedamean-Gresik. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 109-114.
- Hermanu, B. (2016). Implementasi Izin Edar Produk PIRT melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu.
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2021). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia p-ISSN*, 2655, 6277.
- Magdalena, I., Annisa, M. N., Ragin, G., & Ishaq, A. R. (2021). Analisis Penggunaan Teknik Pre-Test dan Post-Test pada Mata Pelajaran Matematika dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran di SDN Bojong 04. *NUSANTARA*, 3(2), 150-165.
- Murhadi, M., Suharyono, A. S., & Rizal, S. (2022). Pelatihan memilih produk pangan sehat, aman dan halal di SMP Kecamatan Trimurjo-Lampung Tengah. *SINAR SANG*

- SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 222-238.
- Pamikatsih, M. (2022). Analisis Kesehatan Keuangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Batik Seloka Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. *Inumiya: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 73-82.
- Pangestika, L. M. W., Swasti, Y. R., Pranata, F. S., & Purwijantiningsih, L. E. Edukasi Diversifikasi Pangan Skala Rumah Tangga pada Masa Pandemi Bagi Masyarakat Di Lingkungan Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 10(2), 147-155.
- Parasan, P. M., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis Pengaruh Industri Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(4), 45-62.
- Rianti, A., Christopher, A., Lestari, D., & El Kiyat, W. (2018). Penerapan keamanan dan sanitasi pangan pada produksi minuman sehat kacang-kacangan UMKM Jukajo Sukses Mulia di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Agroteknologi*, 12(02), 167-175.
- Sangian, Daniel A, Salmin Dengo, and Jericho D Pombengi. 2018. "Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan."